## ABSTRAK

*Penelitian ini didasarkan pada implementasi dalam penetapan dan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli objek PBB yang ditujukan untuk mengkaji latarbelakangperda No13 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang BPHTB yang mana terdapat permasalahan dalam pembayaran BPHTB yang menjadikan Indeks Nilai Tanah sebagai dasarnya, dalam Perda No 13 Tahun 2010 bahwa yang menajdi patokan dalam penetapan pembayaran BPHTB adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai transaksi dan NJOP, tetapi selain itu di Kabupaten Magelang terdapat Indeks Nilai Tanah yang merupakan hasil kajian yang sudah mendapatkan surat edaran Bupati bagi beberapa pihak dijadikan sebagai patokan dalam penetapan pembayaran BPHTB.*

*Hal di atas melatarbelakangi penelitian yang berfokus pada pembahasan tentang mekanisme dan implementasi penetapan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli objek PBB terhadap Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Apakah dalam kenyataanya penetapan pembayaran BPHTB di Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Perda No 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.*

*Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji norma-norma hukum positif atau yang berkaitan dengan kaidah hukum itu sendiri dan asas hukum (hukum positif), yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari mengkaji permasalahan dari segi hukum dalam peraturan daerah kabupaten magelang no 13 tahun 2010 tentang pajak daerah terlebih mengenai BPHTB. Ditambah dengan data skunder yang diperoleh dari beberapa sumber yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu dengan Notaris/ PPAT.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,mekanisme penetapan pembayaran BPHTB di Kabupaten Magelang dalam Perda No 13 Tahun 2010 tentang pajak Daerah tidak diatur secara rinci melainkan hanya secara umumnya saja. Kedua mekanisme penetapan pembayaran BPHTB di Kabupaten Magelang didasarkan kepada harga pasaran atau NJOP dimana lebih tinggi diantara keduanya tetapi di kabupaten magelang terdapat kajian akademis yang berupa Indeks Nilai Tanah yang dimana di dalamnya terdapat patokan patokan harga tanah yang ada di daerah kabupaten magelang. Dimana dengan adanya INT tersebut terdapat beberapa pihak yang salah menerapkan INT tersebut menjadi patokan secara riil dalam penetapan pemnbayaran BPHTB. Padahal INT tersebut hanya berupa Peraturan Bupati Magelang yang mana secara kekuatan hukumnya lebih kuat Perda No 13 Tahun 2010 sehingga seharusnya yang digunakan adalah acuan dari Perda No 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.*



*Kata-kata kunci : BPHTB,Mekanisme, Implementasi,*

*Jual Beli Objek PBB*